

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Studi Di Kelurahan Taipa

Rezdha dwitama¹, Dewi parwati Anesyana¹, Hanifa Juniani¹, Aura Ramadhani Safitri¹,
Rivani Arva Riyanti¹
Mustainah¹, Intam Kurnia¹, Dandan Haryono¹

¹Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Univesitas Tadulako

Email : hanifhjniani@gmail.com, rezdhadwitamae@gmail.com,
arvariyantirivani@gmail.com, aurar1600@gmail.com, lalaofficial185@gmail.com

Kata Kunci

1. Implementasi
2. Kebijakan
3. Program Keluarga Harapan

Abstrak :

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Studi Di Kelurahan Taipa. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) berperan penting dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin dengan menstimulasi perubahan cara hidup agar lebih mandiri dan produktif. Di Sulawesi Tengah, khususnya di Kelurahan Taipa, program ini mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Kelurahan Taipa merupakan salah satu wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Meskipun program ini telah berjalan selama beberapa tahun, masih terdapat berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat efektivitasnya. Sebagian masyarakat penerima menilai bahwa pelayanan dalam hal pengurusan

administrasi, penyaluran bantuan, dan pendampingan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya pendamping, kurangnya sosialisasi yang efektif, ataupun kendala teknis dalam pelaksanaan program. Di Kelurahan Taipa, Program Keluarga Harapan diimplementasikan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Kecamatan Palu Utara, dan kelurahan setempat dengan fokus pada keluarga yang memiliki anak sekolah, ibu hamil, atau lansia, karena keluarga di wilayah ini tergolong miskin dan berhak menerima Program Keluarga Harapan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diketahui, dalam pelaksanaannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di kelurahan Taipa Kota Palu Barat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Keyword

1. **Implementation**
2. **Policy**
3. **Family Hope Program**

Abstract :

Implementation of the Family Hope Program Policy: A Study in Taipa Village. The Family Hope Assistance Program (PKH) is a conditional social assistance program provided by the Indonesian government that aims to alleviate poverty and improve the quality of life for poor families through access to education, health care, and social protection. The Family Hope Program (PKH) plays a vital role in improving the welfare of the poor by stimulating lifestyle changes to become more independent and productive. In Central Sulawesi, particularly in Taipa Village, this program has received attention as part of efforts to improve the social welfare of the local community. Taipa Village is one of the areas where the Family Hope Program is implemented. Although this program has been running for several years, various problems remain that could potentially hinder its effectiveness. Most recipients believe that services in terms of administrative processing, aid distribution, and assistance are not yet fully optimal. This may be caused by limited assistance resources, a lack of effective socialization, or technical obstacles in program implementation. In Taipa Village, the Family Hope Program (PKH) is implemented through coordination between the local government, the North Palu District, and the local sub-district, focusing on families with school-age children, pregnant women, and the elderly. Families in this area are considered poor and eligible for the Family Hope Program. This study employed descriptive qualitative research. The results revealed that the Family Hope Program (PKH) in Taipa Village, West Palu City, aims to alleviate poverty and improve the quality of life for low-income families through access to education, health care, and social protection.

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. PKH berperan penting dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin dengan menstimulasi perubahan cara hidup agar lebih mandiri dan produktif.

Di Sulawesi Tengah, khususnya di Kelurahan Taipa, program ini mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Di negara-negara berkembang, kemiskinan sangat terkait dengan aspek struktural. Misalnya, dampak sistem ekonomi yang tidak adil atau tidak adanya jaminan sosial. Kemiskinan ditimbulkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesempatan kerja yang layak, infastruktur yang kurang, serta ketimpangan ekonomi yang tinggi. Kemiskinan juga seringkali terkait dengan ketidakadilan sosial dan ekonomi, termasuk diskriminasi gender, kepercayaan serta etis. Di tahun 2007 pemerintah Indonesia telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi upaya dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan pada bidang perlindungan sosial. Seperti diatur dalam pasal 1 ayat 9 UU No. 1 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial memilih bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah serta menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.

Kelurahan Taipa merupakan salah satu wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan PKH. Meskipun program ini telah berjalan selama beberapa tahun, masih terdapat berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat efektivitasnya. Sebagian masyarakat penerima menilai bahwa pelayanan dalam hal pengurusan administrasi, penyaluran bantuan, dan pendampingan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya pendamping, kurangnya sosialisasi yang efektif, ataupun kendala teknis dalam pelaksanaan program

LANDASAN TEORI

Seperti dinyatakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1980) yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan sebagai proses yang melibatkan faktor-faktor seperti desain kebijakan, kapasitas aktor (pelaksana), dan lingkungan eksternal. Model top-down menekankan kontrol dari atas (permerintah), sedangkan bottom-up menekankan partisipasi lokal.

METODE

penelitian ini mengimplementasikan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono dalam bukunya tentang metode penelitian kuantitatif, kualitatif (2021) menyatakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian untuk memahami fenomena secara mendalam, menyeluruh melalui interpretasi. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data mengimplementasikan model Mies dan Huberman yang dibagi dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Informan yang menjadi sumber informasi bagi peneliti yaitu : Pendamping Program Keluarga Harapan Kelurahan Taipa, Ketua Program Keluarga Harapan Kelurahan Taipa RT03/Rw05, Penerima Bantuan Sosial dari Program Keluarga Harapan Kelurahan Taipa RT03/Rw05 dengan model pendekatan implemetasi Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Taipa menunjukkan bahwa desain kebijakannya bersifat top-down yang telah dikembangkan oleh Jones dan Mazmanian (1983) yaitu implementasi sebagai proses hierarkis di mana kebijakan dirancang oleh pembuat kebijakan pusat (misalnya, pemerintah federal) dan dijalankan oleh agen agen bawahannya. Hal ini membentuk kerangka program yang cukup kuat terutam pada aspek persyaratan akses layanan dasar dan mekanisme pendaftaran. Meskipun begitu, temuan empiris memperlihatkan

adanya hambatan pada ketetapan sasaran penerima manfaat, di mana masih ditemukan keluarga yang tidak memenuhi kriteria formal namun belum melakukan proses graduasi. Kondisi ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang menyatakan program bantuan sosial di Indonesia sering menghadapi persoalan inclusion dan exclusion yang error akibat lemahnya mekanisme validasi berkelanjutan di tingkat lokal, sekalipun fondasi kebijakannya telah memadai.

Di Kelurahan Taipa, PKH diimplementasikan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Kecamatan Palu Utara, dan kelurahan setempat. Berdasarkan data umum dari Kementerian Sosial, sekitar 20-30% keluarga di wilayah ini tergolong miskin dan berhak menerima PKH, dengan fokus pada keluarga yang memiliki anak sekolah, ibu hamil, atau lansia. Program ini membantu masyarakat dengan memberikan bantuan per keluarga, tergantung komponen (pendidikan, kesehatan, dll.), yang digunakan untuk biaya sekolah, obat, atau kebutuhan dasar). Dalam kerangka teori Mazmanian dan Sabatier (1980), implementasi kebijakan dipandang sebagai proses interaktif antara tiga faktor utama: desain kebijakan, kapasitas aktor, dan lingkungan eksternal. Analisis berikut mengintegrasikan temuan empiris dengan teori ini untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang implementasi PKH di konteks lokal.

Desain kebijakan (policy design) adalah proses merancang dan menyusun komponen-komponen pokok dari suatu kebijakan publik guna mencapai tujuan yang diinginkan. Di bidang ilmu politik dan administrasi publik, desain kebijakan mencakup pengenalan permasalahan, penentuan tujuan, pemilihan alat atau cara pelaksanaan, serta penetapan peraturan, prosedur, dan standar penilaian. Konsep ini sering diterapkan dalam teori pelaksanaan kebijakan, seperti yang dirumuskan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1980), di mana desain kebijakan berperan sebagai elemen penting yang menentukan efektivitas penerapan program.

Dari hasil wawancara narasumber yaitu pendamping program keluarga harapan, bahwa ada cara agar menjadi penerima bantuan sosial bagi masyarakat yang belum dan layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. yaitu melalui dua cara yang pertama secara mandiri melalui aplikasi cek bansos masyarakat dapat mendownload aplikasi di playstore. Dan yang ke dua yaitu

bisa di ajukan di kelurahan melalui operator kelurahan dengan membawa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) yang sudah di fotocopy.

Hasil wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Taipa Palu Utara sudah cukup baik sebagian berkat desain kebijakan yang kuat tetapi ada juga yang masih berjiwa miskin, contohnya, ada beberapa maskyarakat yang memiliki kendaraan roda 4 masih ingin mengajukan penerima bantuan sosial dan ada juga masyakat yang sudah menjadi penerima bantuan sosial tetapi sudah tidak layak menerima dan tidak melakukan graduasi mandiri (pengunduran dari bantuan sosial).

Kapasitas aktor merujuk pada kemampuan, sumber daya, dan kesiapan individu, kelompok, atau organisasi yang bertanggungjawab atas implementasi kebijakan, kapasitas aktor yang kuat meningkatkan peluang keberhasilan implementasi. Sebaliknya, jika kapasitas lemah, kebijakan mungkin tidak tercapai meskipun tujuan kebijakan jelas atau lingkungan mendukung.

Hasil wawancara dari observasi menunjukkan bahwa Kapasitas aktor dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, menunjukkan kekuatan pada komunikasi dan struktur birokrasi, tetapi lemah pada sumber daya manusia serta disposisi pelaksana. Kapasitas yang lemah ini menghambat keberhasilan program meskipun tujuan PKH jelas dan lingkungan pendukung tersedia.

pada komunikasi dan birokrasi pendamping program keluarga harapan melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) yang dilaksanakan tiap sebulan sekali yang di laksanakan perkelompok dan terdiri atas 15 kelompok dari 509 keluarga penerima manfaat (KPM) di kelurahan taipa.

Kapasitas sumber daya manusia lemah karena pelaksana di tingkat kelurahan memiliki kualifikasi yang terbatas,karena kurangnya pendamping program keluarga harapan yang menyulitkan pelaksanaan program secara optimal. Sedangkan standar oprasional prosedur (SOP) yaitu pendamping program keluarga harapan maksimalnya hanya memegang 200 sampai 250 keluarga penerima manfaat (KPM) tetapi ada beberapa pendamping yang memegang hingga 500 keluarga penerima manfaat (KPM) hal ini yang menghambat pelaksanaan program tersebut.

Di harapkan adanya kebijakan dari pemerintah untuk penambahan pendamping di tahun berikutnya agar mengefisienkan pelaksanaan ini.

Menurut Mazmanian dan sabatier melihat lingkungan eksternal sebagai variabel independen yang mempengaruhi implementasi, seperti ekonomi yang tidak stabil atau bencana. Di Taipa, faktor seperti kerentanan bencana dan ekonomi agraris menghambat efektifitas PKH, meskipun dukungan sosial dan politik lokal positif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari beberapa masyarakat di Kelurahan Taipa, yaitu Ibu Nelan dan Ibu Ona, proses mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai dengan memeriksa status aktif Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kelurahan. Menurut Ibu Nelan selaku Ketua PKH, pelayanan di sana sangat baik dan cepat, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses bantuan. Namun, salah satu faktor yang membuat proses pencairan dana terkadang lambat adalah ketidakcocokan data antara Dukcapil dan Kartu Keluarga, misalnya ketika jenjang pendidikan anak di data masih tercatat SD padahal sudah SMP. Meskipun demikian, PKH terbukti sangat membantu kondisi rumah tangga, terutama untuk kebutuhan pokok seperti makanan, sehingga memberikan dukungan penting bagi keluarga miskin di wilayah tersebut. Penjelasan ini menunjukkan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan kesejahteraan, meskipun perbaikan data diperlukan untuk mempercepat prosesnya.

PENUTUP

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan skema bantuan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup keluarga kurang mampu melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta jaminan sosial. PKH memainkan peran krusial dalam memperbaiki kondisi masyarakat miskin dengan mendorong perubahan gaya hidup menuju kemandirian dan produktivitas yang lebih tinggi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier pada tahun 1980, implementasi kebijakan melibatkan 3 elemen seperti :

Implementasi Kebijakan sebagai Proses: Implementasi kebijakan melibatkan faktor-faktor utama seperti desain kebijakan, kapasitas aktor (pelaksana), dan lingkungan eksternal.

Model Top-Down: Menekankan kontrol dan arahan dari pemerintah pusat (atas ke bawah), dengan fokus pada hierarki dan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan.

Model Bottom-Up: Menekankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal (bawah ke atas), yang memungkinkan adaptasi kebijakan sesuai dengan kondisi lapangan.

Di Kelurahan Taipa, PKH diterapkan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, Kecamatan Palu Utara, dan kelurahan terkait. Berdasarkan informasi umum dari Kementerian Sosial, sekitar 20–30% rumah tangga di daerah ini dikategorikan miskin dan memenuhi syarat untuk menerima PKH, dengan prioritas pada keluarga yang memiliki anak usia sekolah, ibu hamil, atau orang lanjut usia. Program ini memberikan bantuan per keluarga berdasarkan komponen tertentu (seperti pendidikan atau kesehatan), yang dapat digunakan untuk biaya sekolah, pengobatan, atau keperluan pokok lainnya.

Dari wawancara dengan pendamping program keluarga harapan, terungkap bahwa ada dua metode bagi masyarakat yang belum terdaftar namun layak menerima bantuan sosial untuk mengaksesnya. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi cek bansos yang bisa diunduh di Play Store. Kedua, dengan mengajukan permohonan di kelurahan melalui operator setempat, dengan membawa salinan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas (2018). *Pedoman pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional*

Dukcapil Indonesia (2021). Standar sinkronisasi dan validasi data kependudukan nasional

Sugiyono (2021) metode pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D

Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier (1980). *the implementation of public policy. Analysis of top-down policy implementation variables.*

Jones dan Mazmanian, , *American Political Science Rivew* (1983)

Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang “kesejahteraan sosial memilih bahwa:
“perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah serta
menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”